

KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DALAM PERSPEKTIF GENDER

Muhamad Mustaqim
YAYASAN PRAMESTA MULYA,
Jawa Tengah, Indonesia
muhamadmustaqim10@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bermaksud mengkaji tentang implementasi kurikulum pada pendidikan dasar yang berbasis pada kesetaraan gender. Untuk maksud tersebut, penulis melakukan penelitian kualitatif. Dengan melihat berbagai fenomena bias dan diskriminasi gender yang selama ini membudaya, termasuk dalam dunia pendidikan menjadikan upaya untuk membangun kurikulum berperspektif gender menemukan relevansinya. Pendidikan dasar, sebagai upaya membangun pengetahuan, keterampilan dan sikap sejak dini menjadi hal penting dalam sosialisasi dan penanaman keadilan gender. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa implementasi kurikulum berperspektif gender ini bisa dilakukan melalui beberapa pendekatan, baik secara implisit, eksplisit, perubahan maupun aksi sosial sebagai upaya dalam meminimalisir bias gender yang ada dalam pendidikan, tentunya dengan berbagai formulasi yang ditawarkan.

Kata kunci: kurikulum, pendidikan, gender

Abstract

BASIC EDUCATION CURRICULUM IN A GENDER PERSPECTIVE. This paper intends to examine the implementation of the curriculum in primary education based on gender equality. For that purpose, the authors did a qualitative research. By looking at

the various of bias phenomena and gender discrimination that is widespread, including in the world of education is making efforts to build the curriculum based on gender perspective finds its relevance. Primary education, as an effort in building the knowledge, skills and attitude since early phase becomes an important thing in the socialization and instilling the gender justice. From the results of research that has been done, it can be noted that the implementation of the curriculum based on gender perspective can be done through a number of approaches, either implicitly or explicitly, changes, or social action in an effort to minimize the gender bias that exists in education, of course with the variety of formulations that are offered.

Keywords: *curriculum, primary education, gender*

A. Pendahuluan

Sebagaimana dipahami bersama bahwa pendidikan merupakan elemen penting dalam pembangunan karakter manusia. Melalui pendidikan, manusia mengetahui, mengenal, melaksanakan tema, kaidah teknologi yang dirasa bermanfaat untuk kepentingan kehidupannya. Melalui pendidikan pula, manusia mampu mewujudkan tujuan penciptaan, yakni dalam dimensi kehambaan dan dimensi kepemimpinan.

Salah satu tujuan pendidikan adalah bagaimana manusia mengimplementasikan nilai-nilai keadilan untuk sesama. PBB melalui Unesco telah menggariskan pilar pendidikan yang terdiri dari empat hal utama, bahwa pendidikan harus berorientasi pada *how to know* (pengetahuan/kognitif), *how to do* (ketrampilan/psikomotorik), *how to be* (sikap/afeksi), dan *how to live together*, hidup bersama secara damai dan santun. Hal ini mengisyaratkan adanya pemahaman akan persamaan dan perbedaan yang harus selalu dihargai dan dihormati. Salah satu aspek perbedaan yang sering kali menyebabkan ketidakadilan adalah aspek gender. Gender secara sederhana dapat dipahami sebagai perbedaan atas laki-laki dan perempuan berdasar konstruksi sosial dan budaya. Hal ini berbeda dengan seks atau jenis kelamin, yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasar atas konstruksi biologis.

Secara bahasa, gender sering diartikan dengan jenis kelamin. Namun secara istilah pengertian seks atau jenis kelamin sangat berbeda

sekali. Jika seks adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada bentuk biologis, maka gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada konstruk sosial budaya yang tercipta (Wahid, 2003: 123). Contoh dari perbedaan yang bersifat seks adalah, jika laki-laki mempunyai jakun, kumis, penis, sedangkan perempuan mempunyai payudara, pinggul besar, vagina, menstruasi dan beranak. Sedangkan contoh dari gender seperti laki-laki itu kuat, tabah, pandai dan sebagainya. Sedangkan perempuan itu lemah, cengeng, rapuh dan kurang pandai. Jadi kalau seks adalah given, takdir dari Tuhan yang tidak bisa dirubah, lain halnya dengan gender yang merupakan penciptaan sosial yang bisa dirubah.

Dalam konteks agama juga seringkali mengalami bias gender, dimana terjadi praktik subordinasi terhadap kaum perempuan. Hal ini dimungkinkan karena tiga hal, pertama, adanya teks yang memang bias gender. Kedua, adanya kesalahan interpretasi terhadap ajaran agama. Ketiga, adanya perlakuan menyimpang dari pribadi-pribadi yang berlindung dibalik institusi agama (Yakin, 2005: 177).

Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa gender merupakan peran, sifat dan perilaku manusia di dalam kehidupan sehari-hari, yang sangat dipengaruhi oleh anggapan-anggapan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan seks adalah ciri-ciri fisik atau genetis yang ada pada manusia, sehingga mereka bisa disebut sebagai laki-laki atau perempuan. Karena gender didasarkan pada konstruk sosial yang tercipta (budaya), maka gender tidak bisa dipisahkan dengan budaya itu sendiri. Karena pada dasarnya gender dibentuk oleh kultur dalam suatu masyarakat (Muslikhati, 2004: 20). Di sini, pandangan gender dalam sebuah komunitas masyarakat berbeda-beda dan bersifat relatif.

Pendidikan dasar, sebagai upaya membangun pengetahuan, ketrampilan dan sikap sejak dini menjadi hal penting dalam sosialisasi dan penanaman keadilan gender. Namun yang terjadi praktik pendidikan dasar, seringkali melestarikan dan mereproduksi konstruksi sosial yang bias gender. Budaya patriarki yang menjadi pangkal bias gender semakin diperkuat melalui institusi pendidikan. Contoh sederhana saja, relasi kuasa dalam kelas di Sekolah Dasar, senantiasa menempatkan laki-laki ke dalam posisi yang superior, ketua kelas misalnya. Masih jarang kita jumpai posisi ketua kelas di

SD yang ditempati oleh seorang perempuan. Hal remeh dan kecil ini menandakan bagaimana bangunan kultur seringkali terdapat diskriminasi gender, dan ini selalu dilestarikan dari generasi ke generasi. Di sinilah, menjadi penting untuk melakukan rekonstruksi relasi sosial dalam pendidikan dasar. Dan kurikulum kiranya menjadi aspek yang mempunyai peran penting dalam proses rekonstruksi ini. Melalui kurikulum yang berkeadilan gender, diharapkan akan mampu membuka ruang dialogis terhadap pengarus utamaan gender di ruang pendidikan dasar secara proporsional.

Pengembangan kurikulum yang kontekstual, menjadi momentum dasar bagaimana implementasi kurikulum berperspektif gender mampu membuka peluang untuk membangun budaya pendidikan yang berkeadilan gender. Untuk mengimplementasi konsep ini, tentunya diperlukan kesadaran gender di semua kalangan, mulai dari pengelola pendidikan, guru dan murid.

Tulisan ini bermaksud membangun kurikulum pendidikan dasar, khususnya di tingkatan SD/MI yang berperspektif gender. Di sini, implementasi nilai gender bukan hanya pada aspek isi atau kontens saja, namun semua kontens dan materi bisa merepresentasikan pemahaman gender bila mempunyai perspektif gender. Sehingga peran guru dan pengelola pendidikan akan sangat mewarnai pelaksanaan kurikulum berperspektif gender ini.

B. Pembahasan

1. Pengertian Kurikulum

Untuk memahami tentang konsep kurikulum, berikut akan dipaparkan pengertian kurikulum baik secara bahasa maupun istilah. Ditinjau dari segi bahasa (etimologi), kurikulum berasal dari kata latin *curriculum*, yang merupakan gabungan dari dua kata *curir* dan *curere*. *Curir* artinya pelari, sedangkan *curere* berarti tempat berlari atau berpacu. Pada awalnya, istilah *curriculum* ini digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani Kuno (Mudhofir, 2009: 3). Mengingat filsafat dan ilmu pengetahuan berasal dari Yunani, maka istilah olahraga inipun akhirnya digunakan dalam bidang pendidikan.

Dalam segi istilah atau terminologi, ada beberapa pendapat tentang istilah kurikulum ini. Secara umum, kurikulum seringkali

diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Dalam UU No. 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Secara lebih mudah, kurikulum dapat dipahami sebagai seperangkat/sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar mengajar. Sehingga kurikulum merupakan pedoman dan dasar yang digunakan oleh penyelenggara pendidikan untuk melakukan proses pembelajaran. Karena merupakan sebuah sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen yang saling terkait dan mempengaruhi.

Dalam kerangka yang lebih spesifik, kurikulum merupakan bentuk operasional yang menjabarkan konsep pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum disusun dan dirumuskan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang telah ada. Di sini, obyek kajian dalam kurikulum tidak terlepas dari tujuan yang dilandasi prinsip dasar filsafat yang dipilih, kualifikasi pendidik, kondisi subyek pendidik, materi yang diajarkan, buku teks, organisasi kurikulum, penjenjangan, metode, bimbingan dan penyuluhan, administrasi, prasarana, biaya lingkungan dan evaluasi (Roqib, 2009: 77). Hingga saat ini, pemahaman kurikulum memanglah sangat luas. Untuk lebih terperinci, maka pelaksana pendidikan (pembelajaran) nantinya menyusun apa yang disebut dengan pengembangan kurikulum.

Dalam pemahaman yang lain, kurikulum dalam pendidikan dapat dimaknai dalam tiga konteks. Pertama, sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik (*course of studies*). Dalam konteks ini kurikulum merupakan seperangkat materi yang harus dipelajari oleh murid dalam proses pembelajaran. Kedua, sebagai pengalaman belajar (*learning experience*). Yaitu sebagai kegiatan dan aktifitas yang dilakukan oleh murid dalam proses pembelajaran tersebut. Dalam hal ini segala aktifitas itu meliputi intra maupun ekstra kurikulum, dengan catatan aktifitas tersebut di bawah kontrol dan tanggung jawab guru atau sekolah.

Ketiga, sebagai program belajar (*learning plan*). Dalam pemahaman ini, kurikulum menyangkut sistem perencanaan yang berisi tujuan yang harus ditempuh, proses dan media, serta alat evaluasi yang digunakan. Sebenarnya ketiga konteks ini merupakan konsekuensi logis dari pengertian kurikulum, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

2. Fungsi Kurikulum

Pada dasarnya kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sehingga apa yang dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajaran, merupakan implementasi dari pengembangan kurikulum yang telah disusunnya. Guru dalam hal ini merupakan aktor yang memainkan skenario bernama kurikulum. Guru yang baik pada dasarnya guru yang mampu melaksanakan kurikulum (RPP) yang telah dibuatnya, tetap dengan melakukan improvisasi, sehingga pembelajaran bersifat dinamis.

Kurikulum bagi sekolah atau pengawas, berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Melalui kurikulum, sekolah mampu mengontrol arah dan capaian pendidikan yang telah dilaksanakan dalam satuan pendidikan. Sehingga akan ada evaluasi untuk penyempurnaan pembelajaran di masa yang akan datang. Khusus bagi wali murid, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Mengingat pendidikan merupakan wahana yang harus dilakukan secara komprehensif - ingat konsep tiga pilar pendidikan formal-informal-nonformal - maka orang tua juga akan mampu membimbing anaknya dalam pencapaian tujuan pendidikan. Sedangkan bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Masyarakat mampu memberikan kontribusi baik materiil maupun non materiil, bila masyarakat memahami arah pendidikan yang termanifestasikan melalui kurikulum. Dan bagi murid, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Melalui kurikulum murid dapat mengetahui isi, tujuan dan bahan ajar yang akan diajarkan dalam pembelajaran.

3. Komponen Kurikulum

Komponen kurikulum dalam hal ini berkaitan dengan unsur-

unsur dasar yang selalu ada dalam kurikulum. Mengingat kurikulum adalah seperangkat sistem, maka sistem tersebut tentu saja terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut berhubungan dan saling berinteraksi, yang masing-masing bertugas mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Sebenarnya ada beberapa pendapat tentang jumlah dan isi komponen kurikulum. Namun, yang sering digunakan adalah empat komponen kurikulum yaitu: tujuan, isi (bahan pelajaran), strategi pelaksanaan (proses belajar mengajar), dan penilaian (evaluasi).

a. Tujuan

Tujuan merupakan orientasi awal dari sebuah program atau kegiatan. Dalam hal ini, kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya program pengajaran di Sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dalam setiap kurikulum lembaga pendidikan, pasti dicantumkan tujuan-tujuan pendidikan yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.

b. Isi

Komponen isi/struktur kurikulum berkenaan dengan pengetahuan ilmiah dan jenis pengalaman belajar yang akan diberikan kepada murid agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang maupun jalur pendidikan yang ada.

c. Pelaksanaan/proses

Strategi pelaksanaan kurikulum memberi petunjuk bagi para pelaksana pendidikan untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara benar dan efektif. Strategi ini merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh

dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran.

d. Komponen Evaluasi

Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelaikan program.

4. Kurikulum Pendidikan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan no 67 tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di jelaskan tentang kerangka dasar kurikulum pada pendidikan dasar, baik SD maupun MI. Berikut akan dipaparkan kerangka dasar tersebut.

Pertama, Kerangka Dasar Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan Struktur Kurikulum pada tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah serta pedoman pengembangan kurikulum pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Kedua, Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah merupakan pengorganisasian kompetensi inti, matapelajaran, beban belajar, kompetensi dasar, dan muatan pembelajaran pada setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Sedangkan prinsip-prinsip penyusunan kurikulum, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Iman, Takwa, dan Akhlak Mulia

Iman, takwa, dan akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun agar semua

mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia.

b. Kebutuhan Kompetensi Masa Depan

Kemampuan peserta didik yang diperlukan yaitu antara lain kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis dan kreatif dengan mempertimbangkan nilai dan moral Pancasila agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab, toleran dalam keberagaman, mampu hidup dalam masyarakat global, memiliki minat luas dalam kehidupan dan kesiapan untuk bekerja, kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, dan peduli terhadap lingkungan. Kurikulum harus mampu menjawab tantangan ini sehingga perlu mengembangkan kemampuan-kemampuan ini dalam proses pembelajaran.

c. Peningkatan Potensi, Kecerdasan, dan Minat sesuai dengan Tingkat Perkembangan dan Kemampuan Peserta Didik

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik.

d. Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah dan Lingkungan

Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum perlu memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah.

e. Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional

Dalam era otonomi dan desentralisasi, kurikulum adalah salah satu media pengikat dan pengembang keutuhan bangsa yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan daerah dan nasional.

f. *Tuntutan Dunia Kerja*

Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

g. *Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni*

Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

h. *Agama*

Kurikulum dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman, taqwa, serta akhlak mulia dan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua matapelajaran ikut mendukung peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia.

i. *Dinamika Perkembangan Global*

Kurikulum menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa, yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antarbangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.

j. *Persatuan Nasional dan Nilai-nilai Kebangsaan*

Kurikulum diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena

itu, kurikulum harus menumbuhkembangkan wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI.

k. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat ditumbuhkan terlebih dahulu sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain.

l. Kesetaraan Gender

Kurikulum diarahkan kepada pengembangan sikap dan perilaku yang berkeadilan dengan memperhatikan kesetaraan jender.

m. Karakteristik Satuan Pendidikan

Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan ciri khas satuan pendidikan. Sehingga tujuan pembelajaran dapat relevan dengan keadaan sekolah. Dalam prinsip pelaksanaan kurikulum tersebut, secara jelas disebutkan bahwa kurikulum harus diarahkan pada pengembangan sikap dan perilaku yang berkeadilan dengan memperhatikan kesetaraan jender. Hal ini menjadi titik poin bahwa implementasi kurikulum diupayakan untuk mampu membangun ruang kesetaraan, termasuk dalam dimensi gender.

5. Bias gender dalam pendidikan

Kajian bias gender dalam pendidikan (Suryadi, 2004: 128-157) meliputi:

1. Kaum laki-laki lebih dominan dalam memilih jurusan dan mempelajari kemampuan atau ketrampilan pada bidang kejuruan teknologi dan industri sehingga dengan jenis ketrampilan kejuruan yang dipelajarinya itu, laki-laki seolah-olah secara khusus dipersiapkan untuk menjadi pemain utama dalam dunia produksi. Sementara itu, perempuan lebih dipersiapkan untuk melaksanakan peran pembantu, misalnya ketatausahaan dan teknologi kerumahtanggaan.
2. Jumlah murid perempuan yang memilih jurusan IPA atau matematika di SMU lebih kecil proporsinya sehingga mereka lebih sulit untuk memasuki berbagai jurusan keahlian di

perguruan tinggi, misalnya dalam berbagai bidang teknologi dan ilmu-ilmu eksakta lainnya. Pada kedua jenis jurusan keahlian itu, proporsi mahasiswi hanya mencapai 19,8 %. Di lain pihak mahasiswi lebih dominan dalam jurusan-jurusan keahlian terapan bidang manajemen (57,7%), pelayanan jasa dan transportasi (64,2%), bahasa dan sastra (58,6%) serta psikologi (59,9%).

3. Pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) perempuan lebih dominan pada program diploma yang menyiapkan guru SLTP ke bawah (68,2%) dan program sarjana yang menyiapkan guru sekolah menengah (55,7%). Gejala ini menunjukkan, perempuan lebih banyak yang dipersiapkan untuk menjadi guru pendidikan dasar dan menengah. Keadaan ini juga ditunjukkan dengan jumlah seluruh guru perempuan dari TK sampai SMU, proporsi perempuan lebih besar (50,8%) daripada jumlah guru laki-laki (49,2%). Sebaliknya tenaga dosen didominasi oleh laki-laki dengan proporsi 70% pada berbagai tingkat jabatan dosen di PT, dan semakin tinggi jabatan dosen semakin kecil proporsi dosen perempuan. Demikian juga untuk jabatan struktural masih didominasi kaum laki-laki, walaupun ada jumlahnya masih sedikit.
4. Kesenjangan gender menurut jurusan, bidang kejuruan, dan program keahlian dalam pendidikan ini tercermin pula dalam proporsi pegawai negeri sipil (PNS), PNS perempuan hanya menempati proporsi 35,4%, dan semakin tinggi golongan jabatan semakin kecil proporsi perempuannya. Hampir semua keahlian PNS dipegang oleh laki-laki kecuali keahlian di beberapa bidang seperti farmasi (57,7%), biologi (47,9%), bahasa dan sastra (45%), dan psikologi (61,1%).

Dari data yang disajikan Suryadi, terlihat jelas ketimpangan dan bias gender dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, masih dibutuhkan gebrakan dalam menghilangkan bias gender terutama sejak dalam lingkungan pendidikan di

Sekolah Dasar. Hal ini dapat diimplementasikan dalam kurikulum berperspektif gender.

6. Implementasi Kurikulum Perspektif Gender

Adanya beberapa bias gender yang terjadi dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar menunjukkan bahwa budaya patriarki dalam struktur dan sistem sosial masyarakat kita bisa digolongkan tinggi. Salah satu upaya untuk melakukan perbaikan sistem dan budaya pendidikan adalah melalui kurikulum yang berbasis gender. Karena kurikulum merupakan seperangkat sistem, maka pembangunan kurikulum yang “ramah” gender, diharapkan mampu memperkecil kecenderungan bias gender yang ada. Melalui implementasi kurikulum perspektif gender, maka segala bentuk kesalahan persepsi, bias gender, maupun diskriminasi gender nantinya dapat dikurangi sedikit demi sedikit.

C. Simpulan

Penerapan pembelajaran dalam lembaga pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berakhlak baik, dan memanusiakan manusia tanpa melihat kepada jenis kelamin tertentu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka uraian tentang prinsip-prinsip pembelajaran dengan kurikulum gender dapat dilihat sebagai berikut:

1) Kesiapan Pendidik dalam pemahamannya mengenai gender

Pendidik diharapkan memiliki kesiapan untuk melaksanakan pembelajaran yang berperspektif gender bagi mata pelajaran yang diampunya. Oleh karena itu, para pendidik sebaiknya menajamkan perasaan mengenai gender agar dalam pembuatan rpp dan proses pembelajaran di kelas tidak ditemukan lagi bias gender.

2) Sikap Pendidik Harus Adil Dan Setara dalam Memperlakukan Peserta Didik

Pendidik memperlakukan peserta didik laki-laki dan perempuan sama. Mereka mendapat tugas dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Tindakan affirmative bisa dilakukan

apabila laki-laki atau perempuan ada yang belum optimal dalam menggunakan kesempatan belajar. Misalkan bagi murid perempuan diberi kesempatan untuk aktif dalam pembelajaran dengan cara memberikan kesempatan pertama bagi murid perempuan untuk merespon dan mengeluarkan pendapatnya dalam pembelajaran sebelum laki-laki. Pendidik mempraktikkan kesetaraan gender dalam perilakunya di kelas. Para pendidik hendaknya tidak melakukan pelecehan secara gender terhadap murid laki-laki maupun perempuan, baik secara tersirat maupun nyata. Pelecehan secara tersirat bisa dalam bentuk kata-kata yang tidak etis, yang secara tidak langsung dapat merendahkan martabat jenis kelamin tertentu.

3) Tidak Mengajari atau Menggurui

Tugas Pendidik adalah mendidik dan bukan untuk menggurui peserta didik. Dalam proses pembelajaran, apalagi untuk hal-hal yang sudah umum diketahui dan dialami oleh peserta didik. Yang harus dilakukan seorang pendidik adalah menjadi perantara mendialogkan apa yang diketahui dan dialami oleh peserta didik. Proses belajar mengajar akan lebih efektif apabila peserta didik secara aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik akan mengalami, menghayati, dan menarik pelajaran dari pengalaman itu, dan akhirnya hasil belajar merupakan bagian dari diri, perasaan, dan tentu saja dalam proses seperti itu peserta didik didorong dan dikondisikan untuk lebih kreatif (Zaini, 2002: 98).

4) Terbuka

Pendidik hendaknya terbuka secara akademik, menggunakan sumber rujukan yang berperspektif gender. Jika dalam materi tertentu tidak ada buku rujukan yang berperspektif gender, maka pendidik harus memberi muatan gender tersendiri dalam menganalisis buku tersebut agar semakin menguatkan pengenalan mengenai gender dan tidak terjebak kembali dalam lingkaran bias gender.

5) Dialog

Prose pembelajaran dua arah dengan cara berdialog merupakan cara pembelajaran yang berdasarkan kepada azas

kesetaraan. Maka proses pembelajaran yang berlangsung bukan pengajaran yang bersifat satu arah, melainkan proses komunikasi dalam berbagai bentuk kegiatan belajar seperti berbagi pengalaman, menelaah wacana, diskusi, memberi komentar kasus, dan sebagainya. Untuk membantu visualisasi beragam persoalan yang didiskusikan dibutuhkan berbagai media, seperti wacana, gambar, film, hand out, kertas dan alat tulis lainnya. Dengan adanya media ini memungkinkan terjadinya dialog kritis antara semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran mulai dari guru dan peserta didik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muslikhati, Siti. 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Nasution. 1993. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan no 67 tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum.
- Roqib, Moh. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: LKIS.
- Suryadi, Ace & Ecep Idris. 2004. *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*. Cet. I. Bandung: Genesindo
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahid, Nusron, et. al. 2003. *Ultimatum Transisi*. Jakarta: Pustaka Salemba.
- Yaqin, Ainul. 2005. *Pendidikan Multikultural: Cross-cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Zaini, Hisyam dkk. 2002. *Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Center for Teaching Staff Development (CTSD) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.